

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai Bahan Pertimbangan dan rujukan dalam penelitian ini akan di cantumkan beberapa hasil penlitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis diantaranya :

1. Skripsi(Ardelya alya Andi 2021) Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor dalam penelitiannya yang Berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini berangkat dari suatu permasalahan kemiskinan dan masyarakat berpenghasilan rendah di daerah Kecamatan Tempe yang menyebabkan banyaknya rumah yang tidak layak untuk di huni(Pampur et al., 2024). Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif., Tujuan dari penelitian ini untuk pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dalam mengukur Efektivitas Pelaksanaann Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah sesuai meskipun masih terdapat hambatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi

Sulawesi Selatan hasilnya efektif. Hal ini ditandai dengan terselesaikannya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah memenuhi indikator efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985:53) menjadi pedoman penulis untuk mengukur efektivitas yakni pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

2. Jurnal, Jannah Hartin Jannah, 2023, Erwan Sastrawan, dan Harnida Wahyuni Adda (2023) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako dalam penelitiannya yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Siwalempu, Kabupaten Donggala, mengkaji dan mengukur efektifitas pelaksanaan program BSPS di desa siwalempu kabupaten donggala. (upaya kedepan agar pelaksanaan program berjalan efektif. (Rachman, 2022). Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif, metode yang digunakan ialah PAR (*Participatory Action Research*). Menurut (Dewi & Purnamasari, 2024) metode PAR lebih efektif karena lebih fokus kepada masyarakat sehingga bisa lebih optimal dalam penyelesaian masalah yang ada dan mendukung peran aktif. Pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa Siwalempu belum efektif, hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih banyak masyarakat penerima bantuan yang mengeluhkan dana yang diberikan tidak cukup, pelaksanaan pembangunan masih terdapat beberapa rumah yang dibangun tidak sesuai dengan prosedur

dan teknis yang ditetapkan, karna masyarakat masih mengikuti budaya membangun rumah sebelumnya, tetapi dari segi Meningkatkan jiwa social masyarakat sangat efektif karna walaupun mereka tidak mempunyai skill dalam hal membangun rumah tapi mereka dengan antusias bergotong-royong memberikan swadaya tenaga untuk membantu dalam proses pembangunan rumah.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Efektivitas

Istilah efektivitas menurut Ensiklopedia Umum, berarti menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Horizon (2020 :162), Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya adanya akibat, pengaruh, dapat membawa hasil. Efektivitas artinya keefektifan yang berarti keadaan berpengaruh, keberhasilan, hal yang berkesan. Ataupun berarti pengaruh dari sesuatu, atau akibat tertentu dari sesuatu. (Pasolong, 2023)

Menurut Campbell J.P (1989) dalam dalam Bachtari Alam Hidayat, Nurma Liliyanti, Mega Nugraha, dan Sunarto (2024), ada lima variabel yang paling menonjol dalam mempengaruhi efektivitas, yaitu : keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.

1) Keberhasilan Program

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan

2) Keberhasilan Sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna.

4) Tingkat Output dan Input

Pada efektivitas dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika output lebih besar dari dapat dikatakan efisien dan sebaliknya, jika input lebih besar dari output, maka dapat dikatakan tidak efisien.

5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

Menurut Lysa Anggraini dan Yusliati (2018:13), efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Mahmudi (2019) Efektivitas adalah hubungan antara *output* terhadap pencapaian tujuan. Semakin besar kontribusi (sumbangan) *output*, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Menurut (Wulansari & Ma'ani, 2021), efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Ketika sebuah organisasi mencapai tujuannya, ia beroperasi secara efektif. Indikator efektivitas menunjukkan efektivitas dan sejauh mana hasil (*results*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin tinggi kontribusi *output* dari hasil untuk mencapai tujuan atau maksud yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja unit organisasi tersebut. (Dewi & Purnamasari, 2024).

Upaya mengevaluasi jalan suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukannya perubahan secara signifikan terhadap bentuk manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*Input*), proses, maupun keluaran (*output*). (Eunike, 2021)

Dari pendapat di atas jelas bahwa efektivitas merupakan konsep yang sangat penting karena dapat menguraikan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Atau, efektivitas adalah tingkat

pencapaian tujuan dibandingkan dengan aktivasi yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Sri Rahayu et al., 2021).

a. Kriteria ukuran efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat Efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu :

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan

agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Menurut Richard M. Steers (1985) dalam Kinalang Sitta, (2022:6) mengatakan ukuran efektifitas sebagai berikut :

- 1) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.
- 2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- 3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja

b. Aspek – aspek Efektivitas

Ada aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian efektivitas di atas, berikut adalah beberapa aspek tersebut:

1) Aspek Peraturan/Ketentuan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau

ketentuan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif.

2) Aspek Fungsi/Tugas

Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakan.

3) Aspek Rencana/Program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

c. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan afektivitas digunakan dengan mengukur sejauh mana ektivitas tersebut berjalan. Terdapat beberapa yang digunakan untuk pendekatan efektifitas yaitu :

1) Pendekatan Sasaran

Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*) Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merelalisasikan sasaran yang hendak di capai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur kegiatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam suatu pengukuran efektivitas dengan

pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sudah sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

2) Pendekatan Sumber

Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektifitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini lebih didasarkan kepada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan tersebut diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi.

3) Pendekatan proses

Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*) Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian

yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

d. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program

Menurut Pasolong, tahun 2022 mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program, antara lain :

- 1) Kualitas Aparatur, yaitu kualitas sumber daya manusia yang mana pada dasarnya merupakan tingkat pengetahuan, kemampuan serta kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.
- 2) Kopetensi Administator, yaitu kemampuan kapasitas individu dalam melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu.
- 3) Sarana prasarana, yaitu suatu penunjang ataupun peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana prasarana adalah bagian penting serta ikut menentukan terselenggaranya aktivitas. Faktor sarana serta prasarana di artikan sebagai peralatan penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana digunakan untuk mempermudah serta memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah.
- 4) Pengawasan, yaitu salah satu diantara fungsi manajemen merupakan proses kegiatan pemimpin dalam memastikan maupun menjamin bahwa tujuan serta tugas dalam sebuah

lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, rencana, serta intruksi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

e. Konsep Program

Program adalah penjabaran dari suatu rencana . Dalam hal ini program merupakan bagian dari sebuah perencanaan. Program sering dikatakan juga dengan kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut Hapsah (2021) program merupakan rumusan dalam membuat gambaran suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan disertai petunjuk – petunjuk dengan cara pelaksanaannya, kemudian dapat merumuskan program kerja secara terperinci dari pada suatu rencana. Sedangkan menurut Mutiatri, 2021 program di artikan secara khusus yaitu sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan, apabila program dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi yang implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

f. Pengertian Program BSPS

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (UJDIH, 2019).

Bentuk BSPS berupa uang dan barang. BSPS berbentuk uang diberikan kepada Penerima BPS digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja. BPS berbentuk barang berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang merupakan insentif bagi Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBR). Besaran BPS diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 158/KPTS/M/2019 tentang besaran nilai dan lokasi BPS.

g. Jenis – jenis Program BPS

1) Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)

PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok. Kegiatan PKRS untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan yaitu :

(a) Keselamatan bangunan

Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.

(b) Kesehatan penghuni

Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

(c) Kecukupan minimum luas bangunan

Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Kegiatan PKRS dilakukan oleh Penerima BSPS yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.

2) Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS)

PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok. Kegiatan PBRS dilakukan oleh Penerima BSPS dengan persyaratan.

Jenis kegiatan BPS (PKRS dan PBRS) dapat dilakukan untuk Rumah yang terdampak bencana, rumah yang terdampak program pemerintah dan/atau Rumah tradisional (*local genius*) dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi)

h. Syarat – syarat Program

Syarat - syarat Penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan menurut (SK 273 Penetapan BantuanSK Bupati (2025) antara lain sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Sudah berkeluarga atau pernah berkeluarga atau belum berkeluarga, namun penyandang disabilitas atau lansia 60 tahun lebih atau belum berkeluarga namun menanggung hidup saudara-saudaranya (didukung keterangan Lurah/Kepala Desa).
 - 3) Kabupaten memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, dengan memenuhi persyaratan:
 - a) Tanah dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas, (minimal Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Lurah/Kepala Desa);
 - b) Tidak dalam status sengketa; dan
 - c) Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
 - 4) Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
 - 5) Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah.
 - 6) Belum pernah memperoleh bantuan program perumahan sejenis selama 10 tahun terakhir; dan
 - 7) Bersedia berswadaya.
- i. Penyelenggaraan BSPS
1. Tahapan

Penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan :

- a. Rekomendasi Calon Penerima BSPS.
 - b. Penetapan Calon Penerima BSPS.
 - c. Penyiapan Calon Penerima BSPS Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk uang.
 - d. Pengadaan dan penyerahan BSPS bentuk barang, dan.
 - e. Pelaporan.
2. Rekomendasi Calon Penerima BSPS
- a. Rekomendasi Calon Penerima BSPS ditujukan kepada Bupati yang dibuat oleh Kepala Dinas yang diseleksi dari proposal atau usulan desa/kelurahan, dan / atau data dasar RTLH pada Dinas
 - b. Rekomendasi Calon Penerima BSPS memuat daftar nama Calon Penerima BSPS beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamatnya yang disebut sebagai daftar BNBA (*By Name By Address*).
3. Penetapan Calon Penerima BSPS
- a. Berdasarkan Rekomendasi Calon Penerima BSPS yang telah dilakukan proses verifikasi, dilakukan penetapan Calon Penerima BSPS.
 - b. Calon Penerima BSPS ditetapkan oleh Bupati.
4. Penyiapan Calon Penerima BSPS

- a. Penyiapan Calon Penerima BSPS dilaksanakan pada lokasi BPS.
- b. Penyiapan Calon Penerima BPS dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan Calon Penerima BPS.
- c. TFL melakukan pendampingan pada tahap perencanaan, Pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan Tahap perencanaan meliputi kegiatan, sosialisasi dan/ atau penyuluhan, verifikasi ulang calon Penerima BPS, kesepakatan calon Penerima BPS; dan identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- d. Kesepakatan calon Penerima BPS dilakukan melalui rembuk warga untuk membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan BPS dan menentukan toko/ penyedia bahan bangunan.
- e. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal dilakukan melalui rembuk antar anggota KP.
- f. Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.
- g. Tahap pengawasan meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.

- h. Tahap pelaporan meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BSPS. (SK Bupati 2025).
5. Pencairan, penyaluran dan pemanfaatan BSPS bentuk uang
 - a. Pencairan BSPS yang berbentuk bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dilakukan melalui Bank Penyalur kepada Penerima BSPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pencairan BSPS dilakukan oleh Bank penyalur ke rekening calon penerima BSPS dalam I (satu) tahap.
 - c. Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima.
 - d. BSPS dengan cara pemindah bukuan/transfer uang dari rekening penerima BSPS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
 - e. Pemindah bukuan / tranfer uang dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/ penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima BSPS. Penarikan tunai BSPS dalam bentuk uang dilakukan dengan 2 (dua) tahap masing – masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari penerima BSPS.

- f. Daftar rencana pemanfaatana bantuan berisi rincian pembelianbahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.
- g. PPK dapat menetapkan pemanfaatan BSPS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi :
Keterbatasan waktu pelaksanaan dan atau kesulitan akses ke lokasi.
- h. Pemanfaatan BSPS dalam 1 (satu) tahap setelah dilakukan analisa kelayakan. (SK Bupati 2025).

6. Pelaporan

- a. Penerima BSPS didampingi TFL menyusun dan menyampaikan suatu laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSPS kepada PPK.
- b. Bank penyalur akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- c. penyaluran BSPS kepada PPK.
- d. TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui Koordinator Fasilitator.
- e. Koordinator Fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK.
- f. PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BSPS kepada PA.
- g. PA menyampaikan laporan kegiatan BSPS kepada Bupati. (SK Bupati 2025).

7. Pengawasan dan Pengendalian

- a. Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSPS.
- b. Pengawasan dilakukan pada tahap seleksi lokasi BSPS, verifikasi calon Penerima BSPS, penyiapan Calon Penerima BSPS, penetapan calon Penerima BSPS, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS, dan pelaporan.
- c. Pengawasan dilakukan oleh PA dengan melibatkan PPK. Dalam melaksanakan pengawasan, PA dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pihak Ketiga merupakan perorangan atau Badan Usaha.
- e. Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSPS.
- f. BSPS yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali. Dalam hal Penerima BSPS tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan, maka BSPS dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum BSPS disalurkan. (SK Bupati 2025).

C. Kerangka Pemikiran

Jumlah penduduk dunia khususnya Indonesia yang begitu besar membutuhkan suatu perhatian khusus dan langkah nyata dalam upaya peningkatan akses perumahan dan kualitas hidup masyarakat, untuk menyikapi hal tersebut pemerintah merencanakan kebijakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini merupakan program yang efektif untuk meningkatkan kualitas perumahan dan kesejahteraan Masyarakat.

Program yang dilakukan oleh dinas terkait belum sepenuhnya efektif sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat yang ada di kecamatan Amuntai Selatan ini menurun, tentunya juga dipengaruhi oleh stimulus-stimulus berupa informasi mengenai program BSPS itu sendiri. Sesuai dengan tinjauan pustaka sebelumnya maka untuk melengkapi kerangka konsep pada penelitian ini. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori efektivitas suatu program menurut Campbell J.P. (1989: 121) Bachtari Alam Hidayat, Nurma Liliyanti, Mega Nugraha, dan Sunarto (2024) tentang efektivitas pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan Program.
2. Keberhasilan sasaran.
3. Kepuasan terhadap program.
4. Tingkat input dan output.
5. Pencapaian tujuan menyelur

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

